PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PERGUB NO 13, BD 2026/NO. 14, 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran sub huruf h BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 194; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 2026; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERDA No. 8 Tahun 2025; PERGUB No. 49 Tahun 2025;

CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap APBD guna memenuhi kebutuhan gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dan kebutuhan mendesak pada perangkat daerah di lingkungan provinsi sumatera selatan.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2026.